KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Minimalisir korban, Komisi V: terapkan kurikulum bencana
Tanggal : Jumat, 30 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Minimalisir Korban

Komisi V: Terapkan Kurikulum Bencana

ANGGOTA Komisi V DPR Musa Rajekshah alias Ijeck meminta agar bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi refleksi bersama bagi semua pihak. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh berhenti hanya pada fase tanggap darurat.

Ijeck meminta Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian sementara, melainkan pada upaya pencegahan jangka panjang. "Penanganan bencana sudah terlaksana semuanya. Tinggal bagaimana pasca-bencana ini, apakah hanya selesai di sini atau kita mau jangka panjang supaya tidak terjadi bencana lagi," kata politikus Golkar ini.

Dia mengungkapkan salah satu penyebab utama bencana banjir adalah pendangkalan sungai dan pemanfaatan bantaran sungai yang tidak sesuai peruntukan. Sungai yang mengalami pendangkalan harus segera dilakukan pengerukan. Bantaran sungai juga harus mulai ditata, jangan lagi ada pemukiman.

Selain infrastruktur, edukasi kebencanaan juga penting dilakukan. ia meminta materi tanggap bencana dijadikan kurikulum resmi di dunia pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga SMA. Sebab penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan Basarnas, tapi juga membutuhkan kesiapan masyarakat. "Ini harus dibiasakan dari kecil," tandasnya.

Sebagai perbandingan, Ijeck mencontohkan di Jepang. Di negara tersebut anak-anak sudah dibekali pengetahuan tanggap bencana sejak dini sehingga mampu meminimalkan korban jiwa saat bencana terjadi.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga berada pada level kementerian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.

Menurut Husni, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, berbagai bencana besar terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar,


FB PRIBADI

Musa Rajekshah

bahkan meluas hingga puluhan kabupaten.

"Indonesia bisa dikatakan sebagai supermarket bencana. Hampir semua jenis bencana ada di negeri kita. Karena itu, penanganannya tidak bisa biasa-biasa saja," ujar Husni dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Husni menilai, skala kebencanaan yang melibatkan banyak daerah secara bersamaan membutuhkan kelembagaan yang kuat. Sehingga dibutuhkan pemimpin utama yang mempunyai kewenangan penuh dalam penanganan bencana nasional.

Sebetulnya dalam berbagai peristiwa bencana besar, banyak institusi Pemerintah telah bergerak. Mulai dari BNPB, TNI-Polri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, pelaksanaan di lapangan kerap belum berjalan dalam satu komando yang terintegrasi.

"Semua bergerak, tapi kurang sinkron. Tujuannya sama, tetapi ketika dijalankan tidak saling bertemu. Akhirnya ada kebingungan, mana yang harus didahulukan, apakah evakuasi, bantuan kemanusiaan, atau pembersihan lokasi," sambungnya.

Kondisi tersebut, lanjut Husni, menunjukkan urgensi kehadiran satu lembaga yang benar-benar menjadi pemimpin utama dalam penanggulangan bencana. Sehingga seluruh kementerian dan lembaga dapat bergerak dalam satu arah kebijakan yang jelas.

"BNPB harus menjadi leader kebencanaan. Kalau kewenangannya diperkuat, bahkan setingkat kementerian, maka koordinasi akan jauh lebih jelas dan cepat," kata dia dengan yakin.

Ia menambahkan, penanganan bencana tidak hanya terbatas pada fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup tahap pemulihan. Tahap ini meliputi pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat serta penyediaan hunian yang layak bagi warga terdampak.

Berkaca pada bencana di wilayah Sumatera, ia menyebut beberapa daerah di Sumut telah mulai tertangani dengan baik, sementara di Aceh masih terdapat wilayah yang aksesnya belum sepenuhnya terbuka hingga saat ini.

"Kita ingin masyarakat bisa kembali beraktivitas, ekonominya berjalan, dan tempat tinggalnya layak. Ini semua butuh penanganan yang serius dan berkelanjutan," ujarnya.

Komisi VIII DPR, tegas Husni, akan terus menjadikan isu kebencanaan sebagai prioritas pengawasan, termasuk dalam pembahasan anggaran tahun 2025-2026. Caranya, dengan mendorong peningkatan pendanaan serta perbaikan tata kelola penanggulangan bencana nasional.

"Apapun ceritanya, kebencanaan ini tidak boleh menjadi urusan yang setengah-setengah. Negara harus hadir secara kuat dan terkoordinasi," pungkasnya. ■ TIF